

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pembangunan Ekonomi Islami

a. Konsep Pembangunan Islami

Pembangunan ekonomi merupakan peningkatan produk nasional secara keseluruhan yang dapat dilihat dari perbandingan pendapatan dengan jumlah penduduk suatu negara. Islam sangat memperhatikan pembangunan ekonomi suatu negara atau lebih tepatnya pembangunan terhadap umat manusia. Khursid Ahmad (1979) menjelaskan bahwa terdapat empat prinsip yang menjadi dasar pembangunan yang Islami sebagai berikut :

- 1) *Tahwid*, yang menjelaskan hubungan antara Allah dengan manusia dan manusia dengan sesamanya.
- 2) *Rububiyah*, yang menjelaskan dasar hukum Allah untuk model pembangunan yang berdasar Islami.
- 3) *Khalifah*, yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di bumi.
- 4) *Tazkiyah*, misi utama utusan Allah yakni menyucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya, lingkungan, masyarakat, dan negara.

Keempat asas tersebut secara substansial telah ada dalam Pancasila yang menjadi ideologi negara Indonesia. Maka dari itu, negara Indonesia dapat mewujudkan cita-cita bangsa yang sejahtera dan berkeadilan.

b. Kebijakan Ekonomi yang berbasis Islam

Berdasarkan berbagai strategi yang dijelaskan diatas maka perlu adanya kebijakan bagi suatu negara agar melakukan pembangunan ekonomi yang berorientasi terhadap semua kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Maka dari itu, Umar Chapra (1993) menjelaskan berbagai kebijakan tersebut yakni :

1) Mengembangkan Sumber Daya Manusia

Agar tercapai *maqashid* dalam kehidupan suatu negara maka diperlukan faktor sumber daya yang bersedia melakukan kegiatan yang baik dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien. Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya motivasi terhadap individu agar mengesampingkan kepentingan sendiri sehingga kepentingan sosial lebih terjaga.

2) Mengurangi Konsentrasi Kekayaan

Pembangunan yang berkeadilan memiliki hambatan berupa konsentrasi kepemilikan atau kekayaan sehingga harus dihilangkan dengan beberapa langkah seperti : mengadakan reformasi terhadap pembangunan didaerah pedesaan, mengembangkan industri kecil dan menengah, kepemilikan yang merata dan adanya kontrol terhadap suatu kegiatan usaha, sistem

keuangan yang berbasis bunga direstrukturisasi kedalam sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islami.

3) Restrukturisasi Ekonomi

Restrukturisasi dalam hal ini harus ada kedisiplinan tertentu agar tidak terjadi *kemubadziran*. Pemerintah harus memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dengan menghapus berbagai korupsi dan *kemubadziran*. Dengan cara memberikan subsidi atas dasar persamaan dan juga dalam sistem perpajakan yang berkeadilan.

4) Restrukturisasi Keuangan

Sistem keuangan yang ada perlu diubah kedalam sistem keuangan yang sesuai dengan nilai Islami. Perbankan harus menghapuskan sistem bunga dan berorientasi terhadap industri kecil dan menengah (UKM). Karena UKM dapat mengurangi sistem ketidakmerataan, konsentrasi kekuasaan, dan konsentrasi kekayaan.

5) Melakukan Perencanaan Kebijakan yang Strategis

Perencanaan yang harus menetapkan perubahan suatu struktur pemerintahan khususnya dalam bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tanpa menyebabkan ketidakseimbangan antara sisi makro dan sisi mikro.

2. Pembangunan Pertanian

a. Pembangunan Sektor Pertanian

Pembangunan disektor pertanian merupakan tahapan yang terdiri dari berbagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, menciptakan lapangan kerja, menjaga ketahanan pangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Sektor pertanian memiliki peran dalam pembangunan ekonomi suatu negara karena sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan pendapatannya dari sektor tersebut. Sektor pertanian mampu memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Todaro dan Smith (2006) memberikan penilaian terhadap sektor pertanian dari tahun ke tahun semakin pasif dan bertidak sebagai sektor pelengkap. Sektor pertanian yang kinerjanya semakin menurun terjadi karena sektor tersebut diabaikan dan tidak menjadi prioritas pembangunan dalam suatu negara (Rickman, 2007).

Todaro dan Smith (2006) menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan yang dilakukan disektor pertanian pedesaan harus diawali dengan cara memperbaiki sumber pokok kemajuan pertanian di desa. Sumber pokok kemajuan pertanian merupakan adanya teknologi dan inovasi, dimana terdapat kebijakan pemerintah dalam menunjang kemajuan pertanian. Dengan demikian, apabila sumber pokok kemajuan pertanian sudah terbentuk akan dapat berguna untuk

memperbaiki taraf hidup petani, dengan cara peningkatan pendapatan, produktivitas, dan hasil produksi yang meningkat.

Dilihat dengan indikator kesejahteraan petani yang mulai menurun. Pembangunan disektor pertanian memiliki hubungan dengan teori Pertumbuhan *The Law Of Diminishing Return* yang dikemukakan oleh David Ricardo. Hukum tersebut menjelaskan bahwa terdapat hukum dimana hasil akan menjadi semakin berkurang. Sektor pertanian mengalami fluktuasi produksi karena penggunaan faktor produksi yang digunakan. Hukum yang dikemukakan oleh David Ricardo menjelaskan bahwa apabila terdapat input variabel yang ditambahkan sedangkan penggunaan dari input variabel lain tetap maka akan terjadi tambahan output yang dihasilkan dari setiap tambahan dari satu unit input yang ditambahkan tersebut awalnya mengalami kenaikan kemudian akan terjadi penurunan apabila input variabel ditambah secara terus-menerus. Input variabel yang tetap berupa tanah, karena tanah memiliki sifat yang tetap meskipun menggunakan banyak variabel. Sedangkan input variabel yang dapat ditambah berupa tenaga kerja dan modal, apabila ditambahkan secara terus-menerus akan mendapatkan hasil yang semakin menurun (Lincoln Arsyad, 2004).

b. Syarat-Syarat Pembangunan Pertanian

Apabila ingin mengembangkan sektor pertanian maka terdapat syarat mutlak dan syarat pelengkap dengan penjelasan sebagai berikut : (A.T Mosher dalam Lincoln Arsyad, 1999)

1. Syarat Mutlak

Yang termasuk syarat mutlak adalah :

a) Terdapat teknologi yang selalu berkembang.

Pertanian membutuhkan berbagai teknologi seperti bagaimana petani menyebarkan benih, memelihara tanaman dari serangan hama, proses panen dan pemeliharaan tanah setelah proses panen.

b) Terdapat pasar yang digunakan untuk menjual hasil produksi petani.

Kesejahteraan petani dapat dilakukan dengan meningkatkan produksi petani kemudian memasarkan dan menjualnya dengan harga yang sebanding dengan tenaga saat proses produksi dan biaya produksi yang telah dikeluarkan.

c) Terdapat bahan baku dan alat produksi lokal.

Untuk meningkatkan produksi pertanian dibutuhkan berbagai alat dan bahan baku yang dapat dengan mudah digunakan petani. Seperti pupuk, obat pemberantasan hama, dan bibit. Berbagai alat dan bahan baku tersebut ketersediaannya didesa terbatas dan untuk menjangkaunya harus menempuh jarak yang jauh.

d) Terdapat sarana pengangkut yang memadai.

Hasil produksi pertanian dipasarkan ke berbagai daerah yang luas sehingga untuk membawa hasil produksi tersebut diperlukan sarana pengangkutan yang efektif.

e) Terdapat sarana perangsang bagi produksi hasil pertanian.

Petani menginginkan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan usaha tani yang dimiliki. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut harus ada faktor yang merangsang seperti perangsang yang memiliki sifat ekonomis. Seperti, harga produk pertanian yang menuntungkan, ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan petani, dan pembagian hasil petani yang adil.

2. Syarat Pelengkap

Yang termasuk syarat pelengkap adalah :

a) Sarana kredit produksi

Untuk melakukan produksi petani membutuhkan modal untuk membeli bibit, pupuk, obat pemberantas hama, dan alat-alat lainnya. Oleh karena itu ketersediaan kredit produksi bagi petani dapat menunjang untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

b) Terdapat pendidikan pembangunan pertanian

Pendidikan pembangunan untuk sektor pertanian berupa pendidikan nonformal seperti penyuluhan dan kursus yang

memiliki tujuan untuk meningkatkan wawasan mengenai produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani.

c) Memperbaiki dan melakukan perluasan tanah pertanian.

Pembangunan pertanian memiliki tujuan untuk meningkatkan hasil produksi petani. Terdapat beberapa hal yakni pertama, melakukan perbaikan terhadap kualitas tanah seperti memberikan pupuk atau memberikan tanah masa istirahat. Kedua, membuka lahan atau tanah pertanian yang baru seperti membuka lahan didaerah yang lain.

d) Kegiatan gotong royong antar petani.

Para petani saling bekerja sama untuk melakukan penanaman dan juga memanen hasil panen secara gotong-royong dan saling membantu sehingga hasil panen yang diperoleh dapat segera dipasarkan.

e) Membuat perencanaan terhadap pembangunan pertanian secara nasional.

Pemerintah perlu membuat kebijakan untuk pembangunan dibidang pertanian dalam jangka waktu tertentu.

c. Tahap-Tahap Pembangunan Pertanian

Terdapat 3 tahap perkembangan pembangunan dibidang pertanian menurut Lincolin Arsyad, 1999 yakni :

1) Tahap Pertanian Tradisional

Pertanian tradisional melakukan produksi sebanyak dua atau tiga tanaman saja berupa makanan pokok dengan menggunakan peralatan yang masih seadanya. Dengan menggunakan modal yang sedikit dan masih menggunakan tenaga manusia yang dominan. Para kerja biasanya berasal dari keluarga sendiri. Jaringan dan pengangkutan terhadap hasil produksi pertanian yang terbatas. Prinsip pertanian modern adalah hasil produksi pertanian bukan untuk meningkatkan pendapatan, tetapi bagaimana untuk mempertahankan hidup dan hanya dikonsumsi bagi keluarga.

2) Tahap Pertanian Tradisional Menuju Pertanian Modern

Produk pertanian yang dihasilkan bervariasi dan produk yang dihasilkan sudah diperjual belikan. Akan tetapi, penggunaan teknologi dan modal masih sedikit.

3) Tahap Pertanian Modern

Tahap ini menggambarkan produktivitas petani yang tinggi. Pemakaian modal dan teknologi yang tinggi. Sehingga, tujuan dari produksi pertanian ditahap ini untuk keperluan perdagangan dan mencari keuntungan.

3. Teori Perubahan Struktural

Teori perubahan struktural berhubungan dengan terjadinya proses transformasi perekonomian suatu daerah atau negara yang sedang berkembang yang pada awalnya memiliki sifat subsisten dan bergantung pada sektor pertanian berubah menjadi struktur ekonomi

yang lebih modern atau berpusat pada kegiatan industri (Todaro,1999). Terdapat beberapa pendapat dari para ahli tentang terjadinya perubahan struktural sebagai berikut :

a. Teori W. Arthur Lewis

Menurut Todaro (1999) bahwa Perubahan struktural yang terjadi dalam suatu perekonomian terbagi menjadi dua sektor Teori pembangunan Lewis dikenal dengan istilah perekonomian model dua sektor (*lewis two sektor model's*) yang fokus pembangunannya terletak pada transformasi ekonomi subsisten. Dua sektor yang dimaksud Lewis yaitu :

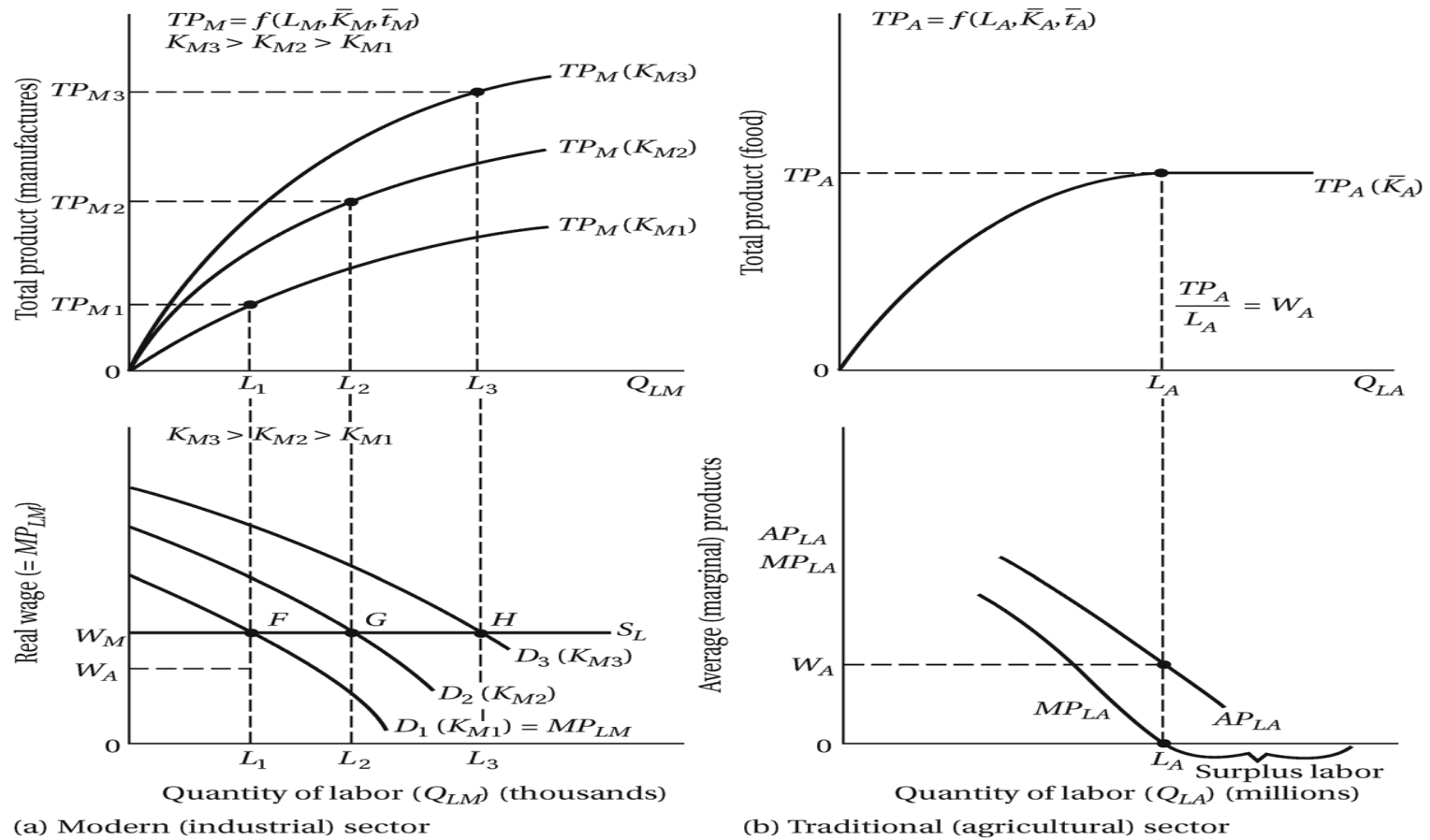
1) Perekonomian Tradisional

Dalam teori ini Lewis menjelaskan bahwa didaerah pedesaan terdapat suatu perekonomian yang bersifat tradisional yang memiliki surplus tenaga kerja. Didalam perekonomian tradisional terdapat kehidupan masyarakat yang subsisten karena kelebihan penduduk yang ditandai oleh produktivitas marjinal tenaga kerja sama dengan nol. Hal ini membuat Lewis mengartikan surplus tenaga kerja akan membuat sebagian tenaga kerja tersebut diambil dari sektor pertanian sehingga sektor pertanian tidak akan kehilangan outputnya.

2) Perekonomian Industri

Perekonomian industri berada didaerah perkotaan dimana terdapat sektor yang dominan yakni sektor industri.

Perekonomian industri memiliki tingkat produktivitas yang tinggi dan menjadi sumber penampungan bagi tenaga kerja yang diperoleh dari sektor pertanian. Oleh karena itu, perekonomian industri yang berada di kota menjadi tujuan bagi tenaga kerja daerah pedesaan sehingga sistem produksi yang tersedia akan mampu meningkatkan output karena terjadinya penambahan tenaga kerja.



Gambar 2.1
Model Perubahan Struktural Dua Sektor

Sumber : Todaro (2000)

Pada gambar 2.1 diatas menjelaskan bahwa kurva disebelah kiri menjelaskan tentang kurva total produksi disektor industri, sedangkan kurva sebelah kanan menjelaskan tentang kurva total produksi disektor tradisional. Kurva L yang terletak sebelah kurva kiri atas adalah fungsi input tenaga kerja, KM adalah Modal, dan TPM adalah teknologi. Pada awalnya keadaan berada di TPM_1 , KM_1 , dan L_1 berada pada posisi yang normal. Kemudian karena terjadi investasi disektor modern maka kurva kiri atas bergeser menjadi TPM_2 , KM_2 , dan L_2 dan seperti itu seterusnya. Kemudian, kurva yang berada dibawahnya menjelaskan besarnya upah dan besarnya penyerapan tenaga kerja. Didalam sektor industri tingkat upah dan penawaran tenaga kerja yang berada dititik WMS_1 hal ini berarti tingkat upah disektor perkotaan lebih besar daripada didaerah pedesaan yang berada dititik $WAAP_{1a}$. Kedaan seperti ini yang menyebabkan terjadinya perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional menuju sektor industri yang menawarkan tingkat upah yang lebih tinggi.

Lewis berpendapat bahwa nilai marjinal dari sektor pertanian adalah nol, yang berada dititik *deminishing return*. Hal tersebut menjelaskan bahwa apabila terjadi peningkatan input atau tenaga kerja disektor tradisional (pertanian) menyebabkan penurunan produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu, apabila terjadi pengurangan tenaga kerja disektor pertanian maka tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi yang dihasilkan oleh sektor pertanian karena pada dasarnya sektor pertanian mengalami surplus tenaga kerja. Sedangkan keadaan didaerah perkotaan permintaan akan tenaga kerja banyak namun tenaga kerja yang tersedia tidak mencukupi. Sehingga untuk memenuhi

kebutuhan akan tenaga kerja dengan mendatangkan tenaga kerja dari desa. Dengan demikian menyebabkan produktivitas tenaga kerja meningkat dan nilai produk marjinal dari tenaga kerja bernilai positif.

4. Nilai Tukar Petani (NTP)

a. Pengertian Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani yang telah dikembangkan sejak tahun 1980-an. NTP adalah indeks perbandingan antara harga yang diterima petani (It) dengan indeks yang harus dibayarkan petani (Ib). Salah satu unsur yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan petani adalah kemampuan berupa daya beli petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tingkat kesejahteraan petani dapat dilihat dari peningkatan daya beli pendapatan petani untuk mencukupi kebutuhannya. Apabila semakin tinggi daya beli petani terhadap barang yang dikonsumsi maka semakin tinggi nilai tukar petani dan juga sebaliknya apabila semakin turun daya beli petani terhadap barang yang dikonsumsi maka semakin turun nilai tukar petani. NTP juga berkaitan dengan hasil pertanian yang dihasilkan kemudian dijual oleh petani dengan barang dan jasa yang dibeli petani atau dikonsumsi oleh petani (BPS, 2016).

NTP selain memiliki fungsi sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan petani, Menurut Badan Pusat Statistik NTP juga digunakan untuk :

1. Menunjukkan daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lainnya.
2. Dapat menggambarkan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh petani dari tahun ke tahun, sehingga dapat digunakan untuk dasar pembuatan kebijakan bagi peningkatan kesejahteraan petani.
3. Mengukur kemampuan tukar dari produk yang dijual oleh petani dengan produk yang dibutuhkan oleh petani baik untuk kegiatan produksi maupun konsumsi rumah tangga.

Konsep petani yang dimaksud oleh BPS adalah petani yang melakukan kegiatan di subsektor tanaman pangan (padi dan palawija), tanaman perkebunan rakyat (kopi, cengkeh, dan tembakau), hortikultura (buah-buahan, sayur-sayuran, dan tanaman hias), peternak (ternak besar, ternak kecil, unggas) dan sektor perikanan (perikanan tangkap maupun perikanan budidaya) (BPS, 2017).

Rahmat (2013) menjelaskan bahwa NTP secara alamiah memiliki karakteristik yang cenderung menurun. Hal tersebut terjadi karena karakteristik yang terdapat pada produk pertanian dan non pertanian yakni :

1. Elastisitas pendapatan dari produk non pertanian bersifat lebih elastik, sedangkan produk pertanian bersifat inelastik.
2. Terjadinya perbedaan struktur pasar, dimana struktur pasar dari produk pertanian bersifat kompetitif, sedangkan pasar dari

produk manufaktur cenderung ke arah pasar oligopoli atau monopoli.

3. Terdapat perubahan teknologi dengan laju yang berbeda sehingga lebih menguntungkan produk manufaktur.

b. Pengukuran Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP adalah indikator yang berfungsi untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani di daerah tertentu. NTP merupakan perbandingan antara Indeks yang diterima petani (I_t) dibandingkan dengan Indeks yang dibayarkan petani (I_b) yang dinyatakan dalam satuan persentase (%) (BPS,2016). Oleh karena itu, NTP dirumuskan dengan :

$$NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100\%$$

1) Indeks Harga yang Diterima Petani (I_t)

Menurut BPS (2016) Indeks harga yang diterima petani merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur rata-rata perubahan harga yang terjadi dalam satu periode dari suatu jenis produksi pertanian dengan tingkat harga tertentu dan periode tertentu. I_t digunakan untuk mengetahui fluktuasi harga barang yang dihasilkan oleh petani dan sebagai unsur dalam penghitungan pendapatan disektor pertanian. I_t memiliki rumus yakni :

$$I_t = \frac{\sum_{i=1}^m \frac{P_{t_i}}{P_{t_{(t-1)_i}}} P_{t_{(t-1)_i}} Q_{oi}}{\sum_{i=1}^m P_{t_{oi}} Q_{oi}} \times 100\%$$

Dimana :

- I_t : Indeks harga yang diterima petani.
- P_{ti} : Harga yang diterima petani bulan ke- t untuk jenis barang ke-
i
- $P_{(t-1)i}$: Harga yang diterima petani pada bulan ke(t-1) untuk jenis
barang ke-i
- $\frac{P_{ti}}{P_{(t-1)i}}$: Harga relatif yang diterima petani bulan ke- t dibanding ke-
(t-1) untuk jenis barang ke-i
- P_{0i} : Harga yang diterima petani pada tahun dasar untuk jenis
barang ke- i
- Q_{0i} : Kuantitas pada tahun dasar untuk jenis barang ke-i
- m : Banyaknya jenis barang yang tercakup dalam paket
komoditas

2) Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)

Menurut BPS (2016) Indeks harga yang dibayar petani (Ib) merupakan indeks yang berfungsi untuk mengukur rata-rata terjadinya perubahan harga dalam suatu periode terhadap komoditas barang dan jasa produksi, tambahan terhadap barang modal, dan konsumsi rumah tangga petani. Ib berfungsi untuk melihat fluktuasi barang yang dikonsumsi rumah tangga petani atau barang produksi yang dihasilkan oleh petani. Ib memiliki rumus yakni :

$$Ib_t = \frac{\sum_{i=1}^m \frac{Pb_{ti}}{Pb_{(t-1)i}} Pb_{(t-1)i} Q_{oi}}{\sum_{i=1}^m Pb_{0i} Q_{oi}} \times 100\%$$

Dimana :

Ib_t : Indeks harga yang dibayarkan petani.

Pb_{ti} : Harga yang dibayar petani pada bulan ke- t untuk jenis barang ke- i

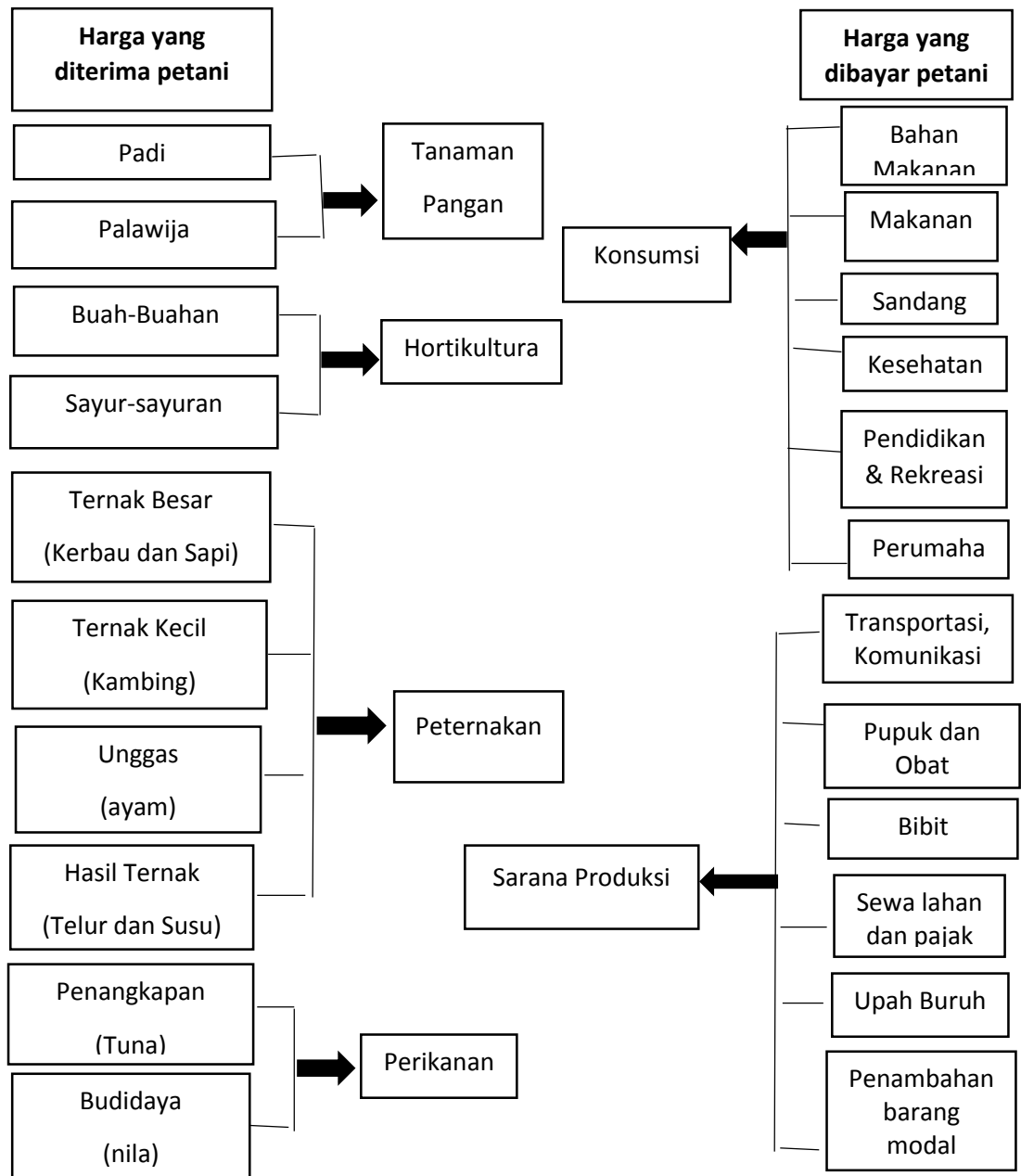
$Pb_{(t-1)i}$: Harga yang dibayar petani pada bulan ke(t-1) untuk jenis barang ke-i

$\frac{Pb_{ti}}{Pb_{(t-1)i}}$: Harga relatif yang dibayar petani bulan ke- t dibanding ke- (t-1) untuk jenis barang ke-i

Pb_{0i} : Harga yang dibayar petani pada tahun dasar untuk jenis barang ke- i

Q_{oi} : Kuantitas pada tahun dasar untuk jenis barang ke-i

m : Banyaknya jenis barang yang tercakup dalam paket komoditas



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Gambar 2. 2
NTP yang dikembangkan oleh BPS

Nilai Tukar Petani (NTP) secara konsepsi adalah hasil dari setiap komponen pembentuk Nilai Tukar Petani yakni apabila laju tukar komponen penerimaan petani lebih tinggi dari laju tukar komponen pengeluaran maka Nilai Tukar Petani (NTP) akan meningkat dan juga sebaliknya (BPS, 2017). Secara umum NTP memiliki tiga pengertian yakni:

1. $NTP > 100$ berarti petani mengalami surplus, dimana harga barang produksi petani meningkat lebih besar dibandingkan dengan harga barang konsumsi petani. Pendapatan petani akan meningkat lebih besar dibandingkan pengeluarannya, sehingga kesejahteraan petani mengalami kenaikan.
2. $NTP = 100$ berarti petani mengalami keadaan impas atau break even. Dimana terjadi kenaikan atau penurunan harga barang produksi petani sama dengan kenaikan atau penurunan harga barang konsumsi petani, sehingga kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan atau konstan.
3. $NTP < 100$ berarti petani mengalami defisit. Dimana terjadi kenaikan harga barang produksi petani lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsi petani. Sehingga kesejahteraan petani mengalami penurunan.

5. Suku Bunga

a. Pengertian Suku Bunga

Suku Bunga merupakan tanggungan yang harus dibayarkan akibat melakukan pinjaman uang yang dinyatakan dalam bentuk persentase dari sejumlah uang yang dipinjamkan. Suku bunga memiliki jangka waktu baik berbentuk bulanan maupun tahunan. Suku bunga dibedakan menjadi dua, yakni : (Muhammad, 2002)

1. Suku Bunga Riil merupakan konsep tingkat suku bunga yang sebenarnya, suku bunga riil diperoleh dari hasil suku bunga nominal dikurangi dengan laju inflasi yang diharapkan.
2. Suku Bunga Nominal merupakan suku bunga yang dapat diamati di pasar.

$$r = i - \mu$$

Dimana :

r = suku bunga riil

i = suku bunga nominal

μ = laju inflasi

Tingkat suku bunga memiliki beberapa peran penting dalam perekonomian yakni : (Muhammad, 2002)

1. Mendistribusikan jumlah kredit yang ada, karena pada umumnya dana kredit yang diberikan kepada proyek investasi yang dapat menghasilkan keuntungan yang besar.

2. Membantu tabungan untuk berjalan ke arah investasi agar mendukung pertumbuhan ekonomi negara.
3. Sebagai alat bagi pemerintah untuk membuat kebijakan agar mempengaruhi jumlah tabungan dan investasi.
4. Dapat menyeimbangkan permintaan uang dan jumlah uang beredar dalam suatu negara.

b. Teori Tingkat Suku Bunga

1. Teori Klasik

Teori Klasik menjelaskan bahwa tabungan dan simpanan merupakan fungsi tingkat bunga. Artinya semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin tinggi keinginan masyarakat untuk menabung atau menyimpan uangnya di bank. Menurut teori klasik bunga merupakan harga yang terjadi di pasar investasi. Sehingga investasi adalah tujuan akhir dari tingkat bunga. (Boediono, 2001)

Investasi akan semakin kecil apabila bunga semakin tinggi, hal ini disebabkan seorang investor akan meningkatkan pengeluaran investasinya karena keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut lebih besar dari tingkat bunga yang dibayarkan untuk investasi sebagai ongkos atas penggunaan dana (*cost of capital*). Sebaliknya Investor akan melakukan investasi apabila tingkat bunga rendah karena biaya atas penggunaan dana semakin kecil sehingga tingkat bunga berada dalam keadaan seimbang. Sehingga antara

investor dan masyarakat memiliki keinginan yang sama untuk menabung (Nopirin, 2000).

2. Teori Keynes

Teori Keynes menjelaskan bahwa tingkat suku bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan uang. Menurut Keynes terdapat tiga motif seseorang memegang uang tunai yakni motif untuk spekulasi, transaksi, dan berjaga-jaga. tiga motif tersebut yang menjadi sumber munculnya permintaan uang atau disebut dengan *Liquidity Preferences*. Teori Keynes menjelaskan terdapat hubungan akan kemauan orang membayar tingkat bunga dengan permintaan uang untuk spekulasi, dimana permintaan akan besar apabila tingkat bunga rendah dan permintaan akan kecil apabila bunga tinggi (Nopirin, 2000).

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Suku Bunga

Besar kecilnya penetapan tingkat suku bunga dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain :

1. Persaingan

Faktor promosi merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan terhadap pesaing. Apabila untuk simpanan maka suku bunga harus lebih besar daripada suku bunga pesaing. Sedangkan untuk suku bunga pinjaman maka harus lebih kecil daripada suku bunga pesaing.

2. Kebutuhan Dana

Kebutuhan dana suatu bank agar dapat dengan cepat terpenuhi yakni dengan cara meningkatkan suku bunga simpanan. Apabila terjadi kenaikan suku bunga simpanan maka akan diikuti dengan kenaikan suku bunga pinjaman secara otomatis.

3. Harga laba yang diinginkan

Untuk mencapai keuntungan dan target maka Bank Sentral memiliki target suku bunga tertentu.

4. Kebijakan pemerintah

Suku bunga ditetapkan oleh Bank Sentral dimana suku bunga simpanan dan pinjaman tidak boleh melebihi apa yang telah ditetapkan.

5. Kualitas Jaminan

Semakin rendah bunga pinjaman yang ditetapkan maka jaminan yang diberikan semakin likuid dan sebaliknya.

6. Jangka Waktu

Semakin tinggi bunga pinjaman maka jangka waktu pinjaman semakin panjang, hal ini terjadi karena resiko dimasa depan yang tidak pasti.

7. Hubungan Baik

Bank memiliki nasabah yang dianggap loyal dan kaktif terhadap kegiatan bank atau disebut nasabah utama. Sedangkan nasabah yang pasif disebut nasabah biasa. Dalam hal pemberian

bunga bank akan berbeda antara nasabah utama dengan nasabah biasa.

8. Reputasi Perusahaan

Berkualitas tidaknya perusahaan akan memperoleh pinjaman dengan tingkat bunga yang dibebankan, hal ini terjadi karena semakin berkualitas perusahaan maka resiko macet sangat kecil.

9. Jaminan Pihak Ketiga

Pihak yang berkualitas dalam memberikan jaminan baik loyalitas maupun kemampuan membayar akan berpengaruh terhadap bunga yang dibebankan.

6. Inflasi

a. Pengertian Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga yang terjadi secara umum dan terus-menerus dalam periode tertentu. Hal ini berarti tidak terjadi kenaikan harga barang secara bersamaan, tetapi terdapat kenaikan harga barang umum secara terus-menerus dalam suatu periode (Mankiw, 2012). Sehingga inflasi akan terjadi apabila kenaikan terhadap suatu barang menyebabkan kenaikan terhadap sebagian besar harga barang yang lain. Misalnya kenaikan harga terhadap bahan bakar umum akan berpengaruh terhadap harga makanan, harga transportasi, dan harga kebutuhan pokok. Oleh karena itu dari

pengertian diatas terdapat tiga hal yang menyebabkan terjadinya inflasi yakni :

- 1) Bersifat umum, yakni terjadi kenaikan harga komoditas secara umum yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat.
- 2) Kenaikan harga, yakni terjadi kenaikan harga suatu komoditas saat ini lebih tinggi dibandingkan harga komoditas sebelumnya.
- 3) Terjadi secara terus-menerus, yakni kenaikan harga terhadap suatu komoditas berlangsung cukup lama dan berlanjut.

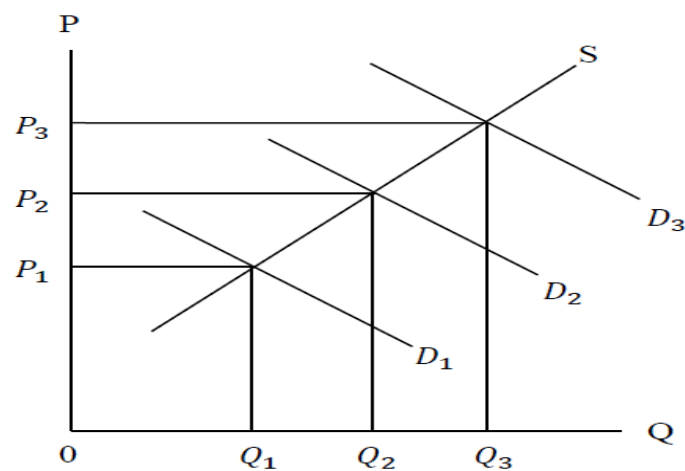
b. Penggolongan Inflasi

Menurut Boediono (2001) Inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis dengan kriteria tertentu yakni :

1. Berdasarkan tingkat parah tidaknya Inflasi terbagi menjadi empat jenis yakni :
 - a. Inflasi Ringan, yakni Inflasi yang memiliki nilai kurang dari 10% per tahun.
 - b. Inflasi Sedang, yakni Inflasi yang memiliki nilai diantara 10-30% per tahun.
 - c. Inflasi Berat, yakni Inflasi yang memiliki nilai diantara 30-100% per tahun.
 - d. Hiperinflasi, yakni Inflasi yang memiliki nilai diatas 100% per tahun.
2. Berdasarkan sebab terjadinya inflasi dibedakan menjadi dua jenis yakni :

a. *Demand Pull Inflation*

Inflasi ini terjadi karena terjadinya kenaikan permintaan total dari masyarakat. Sedangkan perekonomian belum mencapai kesempatan kerja penuh sehingga kenaikan permintaan total akan menyebabkan kenaikan harga dan juga hasil produksi. Oleh karena itu pemerintah perlu membiayai dengan cara pencetakan uang baru sehingga terjadi kenaikan jumlah uang yang beredar.



Sumber : Mankiw (2000)

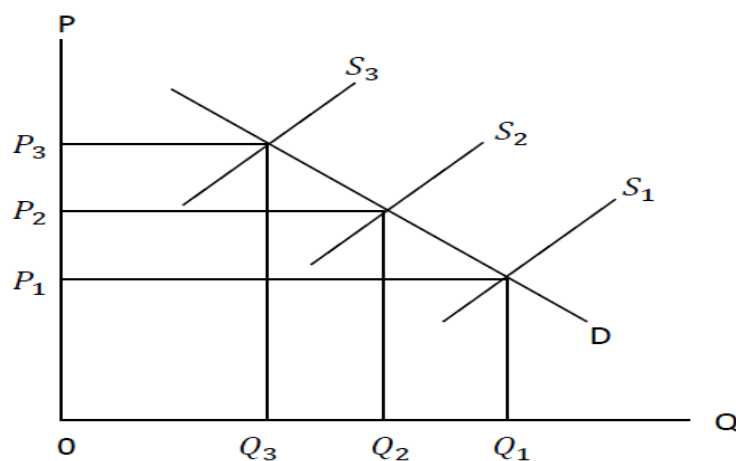
Gambar 2.3
Demand Pull Inflation

Gambar 2.1 menjelaskan bahwa pada awalnya perekonomian berada dalam harga setinggi P_1 dengan barang yang diperjualbelikan sebesar Q_1 . Kemudian, saat terjadi permintaan barang, maka akan menggeser kurva permintaan dari titik D_1 ke D_2 . Pergeseran kurva permintaan ini,

menyebabkan kenaikan harga dari P_1 ke P_2 sehingga meningkatkan jumlah produksi dari Q_1 ke Q_2 . Hal ini akan terjadi secara terus-menerus. Kenaikan harga yang terjadi secara terus-menerus ini disebut “*Demand Pull Inflation*”.

b. *Cosh Push Inflation*

Inflasi ini terjadi karena kenaikan biaya produksi yang tidak diimbangi dengan penawaran total sehingga menyebabkan kenaikan harga dan turunnya produksi. Misalnya terjadinya kenaikan upah menyebabkan produksi menurun.



Sumber : Mankiw (2000)

Gambar 2. 4
Cosh Push Inflation

Gambar 2.2 menjelaskan bahwa pada awalnya keseimbangan terjadi pada harga setinggi P_1 dan kuantitas sebesar Q_3 . Namun, karena terjadi kenaikan biaya produksi (misalnya kenaikan upah) maka produksi akan menurun. Hal ini terlihat pada pergeseran kurva S_1 ke S_2 . Pergeseran kurva

penawaran menjelaskan terjadinya penurunan produksi dari Q_1 ke Q_2 dan kenaikan harga barang hasil produksi dari P_1 ke P_2 . Apabila terjadi kenaikan biaya produksi menyebabkan hasil produksi turun dan akan menggeser kurva penawaran sehingga menyebabkan kenaikan harga produksi. Kenaikan harga karena dorongan biaya inilah yang disebut dengan *cost push inflation*.

Demand pull inflation dan *cost push inflation* menyebabkan harga produksi menjadi meningkat. Akan tetapi, *demand pull inflation* akan menyebabkan Produk Domestik Bruto (PDB) naik akibat jumlah produksi yang meningkat, sedangkan *cost push inflation* menyebabkan Produk Domestik Bruto (PDB) turun akibat jumlah produksi yang menurun.

3. Berdasarkan dari asal Inflasi dibedakan menjadi dua jenis yakni :
- a. Inflasi yang terjadi berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*)

Inflasi ini terjadi karena terdapat defisit anggaran negara yang dibiayai dengan pencetakan uang baru, terjadi gagal panen dan terjadi kenaikan biaya produksi barang maupun jasa.

- b. Inflasi yang terjadi berasal dari luar negeri (*imported inflation*)

Inflasi ini terjadi akibat kenaikan harga barang yang diimpor dari luar negeri yang pada akhirnya menyebabkan : (1) kenaikan biaya produksi industri dalam negeri. (2) kenaikan indeks biaya hidup dalam negeri. (3) kenaikan harga barang dan jasa dalam

negeri, dan terdapat kenaikan pengeluaran pemerintah maupun swasta karena mengimbangi kenaikan harga barang impor.

4. Berdasarkan tingkat intensitasnya inflasi dibedakan menjadi tiga yakni :

a) Inflasi yang merayap (*creeping inflation*)

Inflasi yang memiliki laju kurang dari 10% per tahun, sehingga kenaikan harga berlangsung lambat dengan persentase yang kecil dan jangka waktu yang lama.

b) Inflasi menengah (*galloping inflation*)

Inflasi yang terjadi karena kenaikan harga yang cukup besar dengan jangka waktu yang cukup cepat.

c) Inflasi tinggi (*hiper inflation*)

Inflasi yang terjadi karena kenaikan secara cepat dan berkali-kali sehingga perputaran uang menjadi sangat cepat karena terdapat ketidakpastian harga barang maupun jasa.

c. Teori-Teori Inflasi

Menurut Boediono (2001) teori inflasi dibedakan menjadi 2 yakni :

1. Teori Kuantitas

Teori kuantitas adalah teori yang paling tua tentang inflasi. Teori kuantitas menjelaskan kegunaan inflasi dari : (1) jumlah uang yang beredar bahwa inflasi terjadi apabila terdapat penambahan volume uang yang beredar, hal ini disebabkan contohnya kegagalan panen. Sehingga hanya bersifat sementara apabila jumlah uang yang beredar

tidak ditambah maka inflasi akan berhenti. (2) Harapan masyarakat mengenai harga, bahwa terdapat tiga keadaan yakni masyarakat tidak mengharapkan harga untuk naik di masa yang akan datang, masyarakat menyadari terjadi inflasi, dan hiperinflasi sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap nilai mata uang.

2. Teori Keynes

Menurut teori keynes inflasi terjadi karena keinginan masyarakat untuk hidup diatas kemampuan ekonominya. Terjadi perebutan uang diantara suatu kelompok sehingga aspirasi tersebut dapat berubah menjadi kenaikan permintaan terhadap barang, sehingga jumlah barang yang tersedia tidak dapat mencukupi permintaan tersebut (*Inflationary Gap*). Oleh karena itu terjadi defisit anggaran dalam suatu golongan (pemerintah) yang dibiayai dengan pencetakan uang baru.

3. Teori Strukturalis

Inflasi berkaitan dengan struktural perekonomian suatu negara sehingga terdapat tiga hal yang ditekankan yakni :

- a. Inflasi biasanya terjadi di negara berkembang dalam jangka waktu yang panjang.
- b. Terdapat asumsi bahwa jumlah uang yang beredar meningkat sehingga terjadi kenaikan harga.
- c. Inflasi terjadi tidak hanya faktor struktural perekonomian negara tetapi juga karena kebijakan moneter suatu negara.

d. Efek Inflasi

Menurut Nopirin (2000), Inflasi memberikan beberapa efek terhadap perekonomian sebagai berikut :

1. Efek terhadap perdagangan luar negeri

Inflasi menyebabkan permintaan terhadap barang impor lebih banyak karena harga barang yang murah dibandingkan dengan harga barang dalam negeri yang mengalami kenaikan harga sehingga permintaan rendah.

2. Efek terhadap pendapatan

Inflasi memberikan dampak yang menguntungkan dan merugikan, pihak yang diuntungkan karena inflasi orang yang berpenghasilan tidak tetap seperti investor karena terdapat kenaikan pendapatan riil. Sedangkan pihak yang dirugikan adalah orang yang berpenghasilan tetap karena terjadi penurunan pendapatan riil dimana pendapatan yang mereka miliki tidak dapat untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari karena lonjakan harga.

3. Efek Output

Inflasi menyebabkan kenaikan produksi karena kenaikan harga membuat kenaikan upah pekerja sehingga keuntungan yang diperoleh pengusaha naik, akan tetapi apabila laju inflasi terlalu cepat akan menyebabkan penurunan output.

4. Efek terhadap kesempatan kerja

Inflasi menyebabkan modal keluar lebih besar daripada modal masuk, sehingga investasi menurun hal ini menyebabkan kesempatan kerja menurun dan terjadi pengangguran.

e. Kebijakan Mengatasi Inflasi

Menurut Boediono (2001) Inflasi dapat diatasi dengan berbagai kebijakan antara lain :

1. Kebijakan moneter yakni kebijakan dengan menaikkan suku bunga yang ada dan membatasi permintaan kredit.
2. Kebijakan fiskal yakni kebijakan dengan menaikkan pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah.
3. Berdasarkan segi penawaran yakni dengan menstabilkan harga dan mengurangi biaya produksi, misalkan melakukan penetapan harga, mengurangi pajak impor, dan menggalakkan perkembangan teknologi.

f. Menentukan Inflasi

Untuk menggambarkan perubahan harga dari suatu periode ke periode lainnya maka perlu untuk menentukan tingkat inflasi. Untuk menentukan tingkat inflasi perlu diperhatikan indeks harga konsumen.

Untuk menentukan laju inflasi terdapat rumus sebagai berikut :

$$\pi = \frac{IHK_t - (IHK_{t-1})}{IHK_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana :

π : Laju Inflasi

IHK_t : Indeks harga konsumen periode ke t

IHK_{t-1} : Indeks harga konsumen periode ke t-1 (periode lalu)

7. Harga Gabah

a. Pengertian Gabah

Badan Pusat Statistik (2016) menjelaskan bahwa Gabah merupakan bulir padi. Gabah berasal dari bahasa Jawa, istilah gabah mengacu pada bulir padi yang telah dipisahkan dari tangkai padi (jerami) dengan cara penotakan. Harga gabah merupakan penentuan harga yang dilakukan oleh instansi yang terkait yang dilihat berdasarkan kualitas dari gabah tersebut. Istilah gabah dalam perdagangan komoditas menjadi hal yang penting karena biasanya perdagangan dalam bentuk besar melakukan jual beli dalam bentuk gabah.

Gabah/padi/beras merupakan komoditas yang penting bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pemerintah memberikan regulasi harga terhadap gabah sesuai dengan kualitasnya.

b. Penggolongan gabah

Berdasarkan kualitas gabah terbagi atas beberapa yakni :
(Bulog, 2016)

1. Gabah Kering Giling (GKG) merupakan gabah yang memiliki kadar air maksimal 14%, kotoran/hampa maksimal 3%, butir hijau/mengapur maksimal 5%, butir kuning/rusak maksimal 3%, dan butir merah maksimal 3%.

2. Gabah Kering Simpan (GKS) merupakan gabah yang memiliki kadar air lebih besar dari 14% akan tetapi lebih kecil atau sama dengan 18% ($14\% < KA < 18\%$), kotoran/hampa yang lebih besar dari 3% akan tetapi lebih kecil atau sama dengan 6% ($3\% < HK < 6\%$), butir kecil/mengapur lebih besar dari 5% tetapi lebih kecil atau sama dengan 7% ($5\% < HKP < 7\%$), butir kuning/rusak parah 3% dan butir merah maksimal 3%.
3. Gabah Kering Panen (GKP) merupakan gabah yang memiliki kadar air lebih besar dari pada 18% akan tetapi lebih kecil atau sama dengan 25% ($18 < KA < 25\%$), hampa/kotoran lebih besar daripada 6% tetapi lebih kecil sama dengan 10% ($6\% < HK < 10\%$), butir hijau/mengapur lebih besar dari 7% akan tetapi lebih kecil atau sama dengan 10% ($7\% < HKP < 10\%$), butir kuning/rusak maksimal 3% dan butir merah maksimal 3%

8. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

a. Pengertian PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah dalam waktu tertentu. Menurut BPS (2016), PDRB merupakan jumlah nilai tambah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit usaha maupun seluruh unit ekonomi yang berada dalam suatu wilayah. Apabila semakin tinggi PDRB suatu daerah maka pertumbuhan ekonomi daerah tersebut mengalami kemajuan dibidang ekonomi, dan

sebaliknya apabila PDRB daerah tersebut rendah maka pertumbuhan ekonomi kecil dan belum terjadi kemajuan dibidang ekonomi.

BPS (2016) menjelaskan bahwa PDRB suatu daerah menggunakan dua dasar yakni Perhitungan PDRB atas dasar harga konstan yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun suatu daerah atau dapat diartikan sebagai jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku di tahun tertentu sebagai dasarnya. Sedangkan PDRB atas dasar harga yang berlaku digunakan untuk mengetahui perubahan struktur ekonomi suatu daerah atau dapat diartikan sebagai jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga yang berlaku setiap tahunnya.

BPS (2016) menjelaskan bahwa pembangunan di daerah memiliki berbagai tujuan agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi antar daerah, maka terdapat berbagai sasaran pembangunan daerah yakni :

1. Melakukan pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan aspirasi daerah untuk kepentingan bersama.
2. Melakukan pemerataan pembangunan diseluruh daerah.
3. Mempererat hubungan ekonomi antar daerah sehingga terjalin ikatan ekonomi nasional.
4. Membina daerah perbatasan atau daerah yang mengalami keterbatasan sehingga terjadi pemerataan diberbagai daerah.

b. Pendekatan PDRB

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2016, PDRB secara konseptual memiliki tiga macam pendekatan yakni :

1) Pendekatan Produksi

PDRB diartikan sebagai jumlah nilai tambah terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Unit produksi yang dimaksud dikelompokkan menjadi sembilan sektor yakni :

- a) Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan
- b) Pertambangan dan penggalian
- c) Industri pengolahan
- d) Listrik, gas dan air bersih
- e) Konstruksi
- f) Perdagangan, hotel dan restoran
- g) Pengangkutan dan komunikasi
- h) Keuangan, real estate dan jasa perusahaan
- i) Jasa-jasa (termasuk jasa pemerintah)

2) Pendekatan Pengeluaran

PDRB yang dimaksud adalah semua unsur permintaan akhir yang berasal dari :

- a) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba

- b) Konsumsi pemerintah
- c) Pembentukan modal tetap domestik bruto
- d) Perubahan inventori
- e) Ekspor neto (hasil ekspor dikurangi impor).

3) Pendekatan Pendapatan

PDRB yang dimaksud adalah jumlah balas jasa dari faktor produksi yang melakukan ikut serta dalam proses produksi didalam suatu daerah dengan jangka waktu tertentu. Balas jasa disini diartikan upah, gaji, sewa tanah dan lain-lain yang belum dipotong pajak penghasilan dan langsung netto.

Menurut BPS (2016) Data PDRB dikumpulkan dengan cara sebagai berikut :

- a. Untuk PDRB sektoral, data dikumpulkan berasal dari instansi yang terkait yang berasal dari berbagai sektor , misalkan data produksi, data harga, data pengeluaran. Pengumpulan data tersebut melalui survei maupun estimasi.
- b. Untuk PDRB pengeluaran, data dikumpulkan dari instansi yang terkait yang dapat memberikan data secara resmi, misalkan data ekspor, impor, investasi.

Menurut BPS (2016) data yang berasal dari PDRB dapat digunakan untuk :

1. PDRB atas dasar harga konstan (riil) berguna untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau berbagai sektor dari tahun ke tahun.
2. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) berguna untuk mengetahui kemampuan ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah.
3. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi per kapita penduduk yang terdapat di suatu daerah.
4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per orang atau per individu dalam suatu daerah.
5. PDRB atas dasar harga berlaku berdasarkan lapangan usaha menjelaskan bahwa terdapat peran besar lapangan usaha untuk meningkatkan ekonomi suatu daerah.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (tahun)	Judul	Variabel Penelitian/Metode Analisis	Hasil Temuan
1.	Arlia Renaswari Nirmala, Nuhfil Hanani, dan Abdul Wahib Muhaimin (2016)	Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi nilai tukar Petani Tanaman Pangan di Kabupaten Jombang.	Luas Lahan, Jumlah Produksi, Harga Jual Produk, Harga Pupuk, Jumlah Pestisida, NTP (Regresi Linier Berganda)	Hasil penelitian menjelaskan bahwa harga jual produk dan harga pupuk berpengaruh terhadap nilai tukar petani. Namun, produksi, luas lahan, dan pestisida tidak berpengaruh terhadap nilai tukar petani.
2.	Nurisqi Amalia dan Anisa Nurpita (2017)	Analisis Dinamika Kesejahteraan Petani di Provinsi Jawa Timur	Inflasi, Tingkat Suku Bunga, PDRB, dan NTP (Metode VECM)	Hasil penelitian menjelaskan bahwa inflasi dan suku bunga memiliki pengaruh jangka panjang terhadap NTP. Dan PDRB berpengaruh terhadap NTP

				dalam jangka pendek.
3.	Mohammad Romdhoni Fajri, Sri Marwanti, dan Wiwit Rahayu (2016)	Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi nilai tukar petani sebagai indikator kesejahteraan petani di Kabupaten Sragen	Produktivitas Padi, Luas lahan, Usia, Pendidikan, Jumlah Anggota Keluarga Petani, Harga Gabah, Harga Benih, Biaya Pupuk, Biaya Pesticida, Biaya Tenaga Kerja, Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Petani, Pengeluaran Non Pangan Rumah Tangga Petani, NTP. (Regresi Linier Berganda)	Hasil penelitian menjelaskan bahwa bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar petani padi di Kabupaten Sragen yaitu Produktivitas Padi, Luas Lahan, Harga Gabah, Biaya Pupuk dan Pengeluaran Non Pangan Rumah Tangga Petani. Sedangkan usia, pendidikan, jumlah anggota keluarga petani, harga benih, biaya pestisida, biaya tenaga kerja dan pengeluaran pangan rumah tangga petani tidak berpengaruh

				terhadap NTP.
4.	Destanul Aulia dan Sri Fajar Ayu (2016)	Analisis Saling Hubungan Antara Nilai Tukar Petani dan Angka Harapan Hidup di Sumatera Utara	Angka Harapan Hidup, Pendapatan Petani, dan NTP (Analisis Granger)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka harapan hidup mempunyai hubungan sebab akibat terhadap tingkat pendapatan atau kesejahteraan petani.
5.	Tjetjep Nurasa dan Muchjidin Rachmat (2013)	Nilai Tukar Petani Padi di Beberapa Sentra Produksi Padi di Indonesia	Biaya produksi, biaya tenaga kerja, harga gabah, NTP.(Analisis NTS-padi)	Hasilnya bahwa peningkatan terhadap produksi petani tidak selalu diikuti dengan peningkatan NTP dan cenderung turun karena NTP diukur perbandingan harga yang diterima dan dibayarkan petani. Sedangkan gabah merupakan hasil produksi yang dijual

				petani, dengan demikian diperoleh pendapatan bagi petani. Oleh karena itu dibutuhkan stabilitas terhadap harga gabah.
6.	Mohammad Wahed (2015)	Pengaruh Luas Lahan, Produksi, Ketahanan Pangan dan Harga Gabah Terhadap Kesejahteraan Petani Padi di Kabupaten Pasuruan	Luas Lahan Produksi, Ketahanan Pangan, Harga Gabah, NTP (Analisi Regresi Linier Berganda)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas lahan, produksi, ketahanan pangan dan harga gabah berpengaruh terhadap NTP dan memiliki hubungan yang positif.
7.	Muchjidin Rachmat (2013)	Nilai Tukar Petani : Konsep, Pengukuran, dan Relevansinya sebagai indikator kesejahteraan petani.	Indeks Produksi pertanian, Indeks konsumsi rumah tangga petani, NTP (Analisis Indeks Laspeyres)	Hasilnya menjelaskan bahwa harga dari hasil produksi yang naik belum tentu dapat meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan petani

8.	Nurul Faridah dan Muhammad Nur Syechalad (2016)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar petani sub sektor tanaman pangan padi di Aceh	Luas panen, harga pupuk, produksi padi, infrastruktur dan inflasi (Metode Ordinary Least Square). (OLS)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor luas panen memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap NTP. Sedangkan harga pupuk dan inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap NTP
9.	May Salina Ginting, Rahmanta Ginting, dan Satia Negara Lubis (2014)	Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar petani ubi kayu	Luas lahan, harga jual, harga pupuk dan jumlah tanggungan keluarga (Analisis Regresi Linier Berganda)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas lahan, harga jual, harga pupuk dan jumlah tanggungan keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai tukar petani ubi kayu.
10.	Indah Lestari Setiyowati, Sasongko,	Nilai Tukar Petani dan Analisis	Nilai tukar petani, konversi lahan pertanian, jumlah	Hasil penelitian menjelaskan

	dan Iswan Noor (2018)	Konversi Lahan Pertanian untuk Sektor Pertanian Kemiskinan di Indonesia	buruh tani, produktivitas pertanian. (Jalur)	bahwa kemiskinan berpengaruh terhadap sektor pertanian, sedangkan konversi lahan pertanian tidak berpengaruh terhadap kemiskinan sektor pertanian
11.	Misbahuddin, Made Benyamin, Muh. Syarkawi Rauf, Sanusi Fattah (2015)	Strategi dan analisis terhadap perilaku ekonomi beras rumah tangga di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia	Luas lahan optimum, beras rumah tangga petani, perilaku ekonomi, pendapatan buruh keluarga dalam usahatani padi, kondisi kapasitas produksi pertanian padi, kebutuhan konsumsi rumah tangga petani (Analisis SWOT)	Hasilnya menunjukkan bahwa Penghasilan rata-rata untuk tenaga kerja keluarga pemilik lahan dan bagi hasil adalah Rp 1.199.408,33. Selain itu, strategi yang disarankan untuk meningkatkan kesejahteraan petani adalah strategi bertahan

12.	A.G. Laborte, R.A. Schippe, M.K. Van Ittersum, M.M. Van Den Berg, H. Van Keulen, A.G. Prinsand, M. Hossain (2013)	Kesejahteraan petani, produksi pangan dan lingkungan: penilaian berbasis model terhadap dampak teknologi baru di Filipina utara	Produksi padi hibrida (HYR), strategi pemupukan berimbang (BFS), manajemen hara spesifik lokasi (SSNM) dan manajemen hama terpadu (PHT). (Analisa adopsi teknologi pertanian)	Hasilnya menunjukkan bahwa adanya teknologi awalnya dinggap dapat meningkatkan kesejahteraan petani, namun lambat laun perlu adanya pertimbangan untuk melanjutkan teknologi yang tepat untuk peningkatan NTP.
13.	Muhammad Rizal Taufikurahman dan La Diadhan Hukama (2013)	Dampak Pengurangan Subsidi Pupuk dan Kenaikan Suku Bunga terhadap Kesejahteraan Petani Lada di Indonesia.	Subsidi Pupuk, Suku Bunga, Lada Putih, Kesejahteraan Petani (Metode Two Stage Least Squares / 2 SLS)	Kebijakan mengurangi subsidi pupuk akan berpengaruh signifikan dengan memberikan keuntungan bagi petani lada. Sedangkan kebijakan menaikkan suku bunga berpengaruh signifikan namun

				merugikan petani lada.
14.	Syafruddin, I Made Suyana Utama, I G. W. Murjana Yasa, A. A. I. N. Marhaeni (2018)	Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi dan Demografis terhadap Modal Sosial, Kinerja Pertanian dan Kesejahteraan Petani di Sumbawa, Indonesia	Sosial ekonomi, sosial demografi, modal sosial, dan kinerja usahatani , kesejahteraan petani (Metode SEM-PLS)	Hasil penelitian menjelaskan adanya pengaruh positif dan signifikan antar variabel. Modal sosial, kinerja pertanian dan sosial demografi berpengaruh untuk meningkatkan kesejahteraan petani padi di desa Sumbawa.

C. Hipotesis

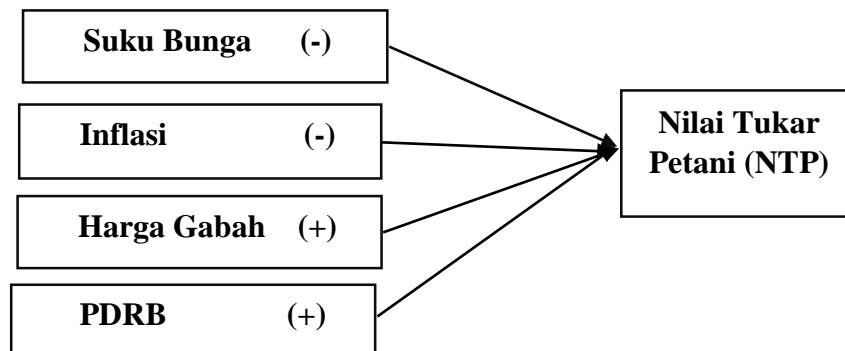
Berdasarkan dari penelitian terdahulu, maka penulis membuat hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Diduga Suku Bunga berpengaruh negatif terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Wonogiri.
2. Diduga Inflasi berpengaruh negatif terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Wonogiri.
3. Diduga Harga Gabah berpengaruh positif terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Wonogiri.

4. Diduga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Wonogiri.

D. Model Penelitian

Berdasarkan pemikiran teoritis dan penelitian terdahulu. Untuk menganalisa masalah yang ada dalam penelitian ini maka hubungan variabel independennya yaitu Inflasi, Suku Bunga, Harga Gabah, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan variabel dependennya yaitu Nilai Tukar Petani (NTP). Diduga variabel Suku Bunga dan Inflasi berpengaruh negatif terhadap Nilai Tukar Petani (NTP). Sedangkan Harga Gabah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap Nilai Tukar Petani (NTP). Oleh karena itu, dapat digambarkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Wonogiri dengan model sebagai berikut :



Gambar 2.5
Kerangka Hipotesis Pemikiran